



Teokrasi dan Musyawarah dalam Pemerintahan Nabi Muhammad SAW Mengenai Kajian Konstitusional atas Piagam Madinah

Alreza Revaldo Habib Habiby Tambunan*¹, Farandi Wiryanata Putra², Abidin Latua³
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia^{1,2,3}
e-mail: ridhoalreza37@gmail.com^{*1}, fwiryanataputra@gmail.com²,
abidinlatua11@gmail.com³

Abstract

The Islamic system of government has undergone significant development throughout the history of the Muslim community. Beginning with the leadership of Prophet Muhammad SAW, governance was based on divine revelation and the principles of justice and consultation. The period of the Khulafaur Rasyidin continued this legacy by emphasizing shura (consultation) and leadership equality. However, a notable shift occurred during the Umayyad Dynasty, which introduced hereditary monarchy, followed by the Abbasid Dynasty, which developed a more complex governmental bureaucracy. This study addresses the characteristics of Islamic governance in each period and how these transformations affected the core principles of Islamic rule. The research employs a descriptive-qualitative method with a historical-comparative approach, aiming to analyze the dynamics and transformation of government systems from the Prophet Muhammad's era to the Abbasid Dynasty. The findings reveal that although core Islamic values such as justice, consultation, and adherence to Sharia remained foundational, the exercise of power shifted from collective to monarchical structures. This study concludes that socio-political contexts greatly influenced the form and implementation of governance in Islamic history.

Keywords: *Government System, Islamic Law, Khulafaur Rasyidin, Umayyad Dynasty, Abbasid Dynasty*

Abstrak

Sistem pemerintahan dalam Islam mengalami perkembangan signifikan seiring perjalanan sejarah umat Islam. Dimulai dari masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, pemerintahan dijalankan berdasarkan wahyu Ilahi dan prinsip keadilan serta musyawarah. Periode Khulafaur Rasyidin melanjutkan sistem ini dengan menekankan nilai-nilai syura dan kesetaraan dalam kepemimpinan. Namun, perubahan mencolok terjadi pada masa Dinasti Umayyah yang memperkenalkan sistem monarki hereditas, diikuti oleh Dinasti Abbasiyah yang mengembangkan birokrasi pemerintahan yang kompleks. Permasalahan yang diangkat dalam kajian ini adalah bagaimana karakteristik sistem pemerintahan Islam pada setiap periode tersebut serta bagaimana perubahan tersebut memengaruhi prinsip dasar



pemerintahan Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan historis-komparatif, yang bertujuan untuk menganalisis dinamika dan transformasi sistem pemerintahan dari masa Rasulullah SAW hingga masa Dinasti Abbasiyah. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, musyawarah, dan syariah tetap menjadi dasar, terjadi pergeseran dalam pelaksanaan kekuasaan, terutama dari sistem kolektif ke monarki. Kajian ini memberikan pemahaman bahwa konteks sosial-politik sangat memengaruhi bentuk dan praktik pemerintahan dalam sejarah Islam.

Kata Kunci : Sistem Pemerintahan, Hukum Islam, Khulafaur Rasyidin, Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah

A. Pendahuluan

Sistem pemerintahan dalam Islam merupakan bagian integral dari ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang tidak hanya bertujuan mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan antar sesama manusia dalam konteks sosial dan politik. Dalam sejarah Islam, fondasi pemerintahan telah diletakkan secara sistematis sejak berdirinya negara Madinah, yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Melalui Piagam Madinah, Rasulullah memprakarsai struktur pemerintahan yang inklusif, mencakup masyarakat multikultural yang terdiri atas Muslim, Yahudi, dan kelompok-kelompok suku lain. Piagam ini dianggap sebagai bentuk awal dari konstitusi modern dan mencerminkan prinsip-prinsip keadilan (*al-'adl*), musyawarah (*as-syura*), persamaan (*al-musawah*), serta tanggung jawab kepemimpinan (*al-amanah*).¹

Namun demikian, dalam perjalanannya sistem pemerintahan Islam mengalami perkembangan dan pergeseran, khususnya setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Masa Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah, dan Abbasiyah masing-masing membawa corak dan tantangan tersendiri. Salah satu persoalan krusial yang muncul adalah bagaimana mempertahankan nilai-nilai dasar pemerintahan Islam dalam konteks realitas politik yang dinamis. Pada masa Umayyah, misalnya, bentuk pemerintahan berubah menjadi monarki turun-temurun, sementara Abbasiyah menampilkan sistem birokrasi yang lebih kompleks dan tersentralisasi. Transformasi ini menimbulkan perdebatan di kalangan ulama dan intelektual Muslim terkait legitimasi politik dan kesesuaian antara praktik pemerintahan dan ajaran Islam yang asli.

¹ Said Amirulkamar and Eka Januar, *Politik Dan Pemerintahan Islam*, ed. Badri Hasan, Zahir Publishing, Edisi ke-1 (Sleman, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021).



Permasalahan yang kemudian muncul adalah adanya kesenjangan antara prinsip-prinsip ideal sistem pemerintahan Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah dengan praktik politik yang berkembang dalam sejarah kekhalifahan Islam. Pemerintahan yang seharusnya menjamin keadilan, transparansi, dan partisipasi umat, dalam banyak periode berubah menjadi otoriter, elitis, dan menjauh dari nilai-nilai kemaslahatan umum (*maslahah al-'ammah*). Realitas ini menuntut adanya kajian ulang terhadap perkembangan sistem pemerintahan Islam dengan pendekatan yang tidak hanya normatif tetapi juga historis dan kontekstual.

Dalam perspektif *fiqh siyasah*, pemerintahan Islam bukan sekadar struktur kekuasaan, tetapi merupakan instrumen untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan umat. Seorang pemimpin dalam Islam dipandang sebagai wakil umat (*na'ib 'an al-ummah*) sekaligus penjaga syariat. *Fiqh siyasah* menggarisbawahi bahwa kekuasaan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi harus diarahkan pada pencapaian tujuan *syariah* (*maqashid al-syari'ah*), yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini, pengembangan sistem pemerintahan Islam harus senantiasa mempertimbangkan konteks sosial-politik yang terus berubah, tanpa mengabaikan prinsip dasar keadilan dan kemaslahatan.²

Sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an *Surah An-Nisa* ayat 58, Allah SWT memerintahkan agar amanah ditunaikan kepada yang berhak dan apabila menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya dilakukan dengan adil. Ayat ini menjadi dasar normatif bagi sistem pemerintahan Islam yang berorientasi pada keadilan substantif. Nabi Muhammad SAW sendiri dalam berbagai hadis menjelaskan bahwa pemimpin yang adil akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, sementara pemimpin yang zalim akan mendapatkan murka-Nya. Pesan ini menunjukkan bahwa pemerintahan dalam Islam mengandung dimensi spiritual dan etis yang sangat mendalam.

Berangkat dari berbagai dinamika dan tantangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan sistem pemerintahan Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga masa dinasti Abbasiyah. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji kesinambungan prinsip-prinsip dasar pemerintahan Islam serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya pada masa kekhalifahan. Selain itu, penelitian ini juga

² R Rudiensyah, "Analisis Pemikiran Politik Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo Tentang Negara Islam Indonesia" (Univesitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021), <http://repository.uinsu.ac.id/15474/%0Ahttp://repository.uinsu.ac.id/15474/1/TESIS-RUDIANSYAH-NIM3001193007.pdf>.



berupaya meninjau ulang pemikiran politik Islam dalam fiqh siyasah sebagai upaya untuk menawarkan model pemerintahan yang adaptif, adil, dan kontekstual dengan realitas kekinian.³

Dengan pendekatan integratif antara sejarah, hukum positif, dan fiqh siyasah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan konsep pemerintahan Islam yang tidak hanya ideal secara normatif, tetapi juga relevan dan aplikatif secara praktis. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengisi kekosongan kajian terdahulu yang cenderung terfokus pada aspek formal-institusional atau ideologis, tanpa menggali lebih jauh dinamika politik dan sosial yang mempengaruhi perubahan sistem pemerintahan Islam sepanjang sejarah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Desain penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika dan implementasi sistem ketatanegaraan dalam sejarah pemerintahan Islam, khususnya pada masa Nabi Muhammad SAW, masa Khulafaur Rasyidin, Dinasti Umayyah, dan Dinasti Abbasiyah. Kajian ini juga meninjau perkembangan struktur pemerintahan dan prinsip-prinsip dasar ketatanegaraan dari sudut pandang fiqh siyasah (politik dalam Islam).⁴ Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui studi pustaka terhadap karya-karya klasik dan kontemporer yang membahas sistem pemerintahan Islam, serta data sekunder berupa literatur sejarah, dokumen keislaman, kitab fiqh siyasah, dan hasil penelitian terdahulu.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan analisis teks terhadap sumber-sumber primer dan sekunder tersebut. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan induktif, yaitu dengan menggali makna dari berbagai data historis dan normatif untuk memahami karakteristik sistem ketatanegaraan Islam dalam setiap periode pemerintahan yang dikaji, serta bagaimana nilai-nilai dasar Islam diimplementasikan dalam praktik kenegaraan.⁵ Populasi dalam penelitian ini mencakup

³ Armaya Azmi et al., *Politik Hukum Islam: Pergumulan Politik Dalam Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, ed. Armaya Azmi, Edisi ke-1 (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021).

⁴ Chanchal Anggarwal, "Penelitian Deskriptif vs Analitis: Memahami Perbedaannya," *Shiksha Online*, 2025, <https://www.shiksha.com/online-courses/articles/descriptive-vs-analytical-research-understanding-the-difference/>.

⁵ Pujiati, "Sumber Data Penelitian: Jenis, Bentuk, Metode Pengumpulan," *Deep Publish*, 2024, <https://penerbitdeepublish.com/sumber-data-penelitian/>.



seluruh literatur dan referensi yang relevan dengan topik pemerintahan Islam dari masa kenabian hingga masa kekhalifahan Dinasti Abbasiyah, sementara sampel dipilih secara purposive berdasarkan kesesuaian konten dan keabsahan sumber. Instrumen penelitian berupa pedoman kajian literatur yang disusun berdasarkan fokus penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran objektif mengenai sistem ketatanegaraan Islam dalam lintas sejarah, baik dari sisi struktur, prinsip, maupun perubahannya dari masa ke masa.⁶

C. Pembahasan

Dengan mempertimbangkan peran sentral sistem pemerintahan dalam sejarah Islam, maka penting untuk mengkaji bagaimana sistem tersebut terbentuk, berkembang, dan diterapkan dari masa ke masa. Pemahaman yang mendalam terhadap sistem pemerintahan pada masa Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah, dan Abbasiyah tidak hanya memberikan wawasan historis, tetapi juga menjadi bahan refleksi dalam merumuskan sistem pemerintahan yang ideal berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan sistem pemerintahan Islam dari masa Nabi Muhammad SAW hingga dinasti Abbasiyah, serta mengidentifikasi nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi dalam praktik pemerintahan Islam pada periode tersebut.

Ketatanegaraan Masa Nabi Muhammad SAW

Nabi Muhammad SAW adalah seorang tokoh revolusioner yang berhasil mengubah pola kehidupan masyarakat Arab, bahkan dunia, dalam berbagai aspek. Pembentukan hukum Islam pada masa beliau terbagi dalam dua periode penting: Periode Makkah dan Periode Madinah.⁷ Pada periode pertama yaitu Periode Makkah, jumlah pengikut Nabi Muhammad masih sedikit, sehingga wahyu Al-Qur'an belum dapat

⁶ Revlina Octavia Artrisdyanti and Vanya Karunia Mulia Putri, "Sampel Penelitian: Pengertian, Tujuan, Dan Cara Menentukannya," Kompas.com, 2023, <https://www.kompas.com/skola/read/2023/05/12/090000569/sampel-penelitian--pengertian-tujuan-dan-cara-menentukannya?page=all>.

⁷ Fenolia Intan Saputri and Moch Choirul Rizal, "Studi Pemikiran Ketatanegaraan Imam Al-Mawardi," *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022): 15–32, <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i1.157>.



dijalankan secara efektif dalam masyarakat.⁸ Pengikut Nabi yang masih minoritas tidak cukup untuk merubah struktur sosial yang ada. Penindasan dan permusuhan dari kaum kafir Quraisy semakin intens, puncaknya adalah hijrahnya Nabi Muhammad SAW bersama pengikutnya ke Madinah.

Berbeda dengan respons masyarakat di Mekkah, pada Periode Madinah ajaran Nabi Muhammad diterima dengan baik. Ini terlihat dari dua peristiwa penting, yaitu Bay'ah al-Aqabah I dan II, yang diikuti oleh 12 orang pada peristiwa pertama dan 73 orang pada peristiwa kedua, saat musim haji. Mereka menyatakan diri masuk Islam, menyembah Allah semata, meninggalkan keburukan, dan patuh kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini menandai titik balik politik bagi Nabi dan pengikutnya, menjadikannya sebagai kekuatan politik yang solid dan akhirnya mendirikan negara Madinah.

Pada saat di Madinah, Nabi Muhammad menyusun Piagam Madinah pada tahun pertama hijrah. Piagam ini berisi prinsip kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, serta kewajiban untuk mempertahankan persatuan hidup. Piagam Madinah terdiri dari 47 pasal dan menjadi dasar hukum bagi warga Madinah yang majemuk. Di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad, negara Madinah dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Piagam Madinah. Piagam ini menjadi konstitusi bagi negara Madinah, menjadikannya negara yang memenuhi syarat-syarat dasar sebuah negara: wilayah, penduduk, pemerintahan, dan undang-undang dasar.⁹

Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah pada 622 M, beliau pertama kali mendirikan masjid di Quba dan membangun kota Madinah. Kedua peristiwa ini menunjukkan pentingnya hubungan antara manusia dengan Allah dan antar sesama manusia, serta memperkuat hubungan antara negara dan agama dalam Islam.

Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW diatur oleh Piagam Madinah yang mengatur hak dan kewajiban berbagai kelompok masyarakat, termasuk umat Islam, Muhajirin, Ansar, dan golongan non-Muslim seperti Yahudi dan Nasrani, yang dikenal sebagai kafir dzimmi (warga non-Muslim yang setia kepada pemimpinnya).

⁸ Firmansyah, Windy Riyani, and Nyimas Lidya Putri, "Prinsip Syura Dalam Ketatanegaraan Indonesia," *Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (2023): 36–49, <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.7209>.

⁹ Irfan Fauzi, Abdul Mukti, and Zaini Dahlan, "Pembangunan Pemerintahan Madinah Melalui Pemikiran Dan Usaha Intelektual Perspektif Peradaban Islam Masa Nabi Muhammad Saw," *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 8, no. 2 (2021): 123–27, <https://doi.org/10.56015/governance.v8i2.46>.



Piagam Madinah memberikan prinsip kebebasan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia, sementara urusan duniawi diatur oleh umat sendiri. Piagam Madinah membawa nilai-nilai seperti kesetaraan, perlindungan, dan keamanan bagi semua warga, baik Muslim maupun non-Muslim.

Sistem pemerintahan di Madinah berdasarkan Piagam Madinah mencakup kesejahteraan materiil dan spiritual. Pemerintahan Madinah menerapkan pembagian tugas yang jelas dengan menempatkan orang-orang yang kompeten pada posisi-posisi penting, seperti bawahir (menteri), katib (sekretaris), wali (gubernur), amil (pengelola zakat), dan qadhi (hakim).¹⁰ Nabi Muhammad juga membentuk beberapa provinsi seperti Madinah, Taima, Al-Jannat, Makkah, Najram, Yaman, dan Hadramaut, dan di setiap provinsi diangkat seorang wali, qadhi, dan amil.

Dalam hierarki hukum Islam, Piagam Madinah berada di bawah Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Dalam pasal 47 Piagam Madinah, disebutkan bahwa apabila terjadi perselisihan, urusan tersebut harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini menunjukkan bahwa Piagam Madinah merupakan produk hukum Islam yang ditetapkan melalui ijtihad Rasulullah SAW bersama umatnya. Sebagai Kepala Negara, Nabi Muhammad SAW memperoleh kekuasaan melalui kesepakatan dengan masyarakat Madinah (*Bay'ah al-Aqabah*). Jika dibandingkan dengan teori politik modern, ini bisa disamakan dengan konsep kontrak sosial, di mana masyarakat menyerahkan sebagian haknya kepada pemimpin untuk menjamin kebebasan dan keteraturan.

Dalam menjalankan pemerintahan, Nabi Muhammad SAW tidak memusatkan kekuasaan pada dirinya sendiri. Untuk mengambil keputusan, beliau sering berkonsultasi dengan pemuka masyarakat. Ada empat cara yang ditempuh Nabi: pertama, bermusyawarah dengan sahabat senior; kedua, meminta pertimbangan dari para profesional; ketiga, melibatkan masyarakat dalam forum yang lebih luas; dan keempat, mengambil keputusan sendiri. Nabi Muhammad SAW tidak memisahkan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Beliau bertindak sebagai legislatif dengan menyampaikan ketentuan Al-Qur'an kepada masyarakat Madinah. Untuk masalah yang

¹⁰ Nadya Putri Permata Sari and Saadatul Maghfira, "Tinjauan Hukum Tata Negara Islam Terhadap Peran Pemerintah Dalam Menjaga Ketenteraman Dan Ketertiban Umum," *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah* 2, no. 1 (2021): 124–34, <https://doi.org/10.31857/s013116462104007x>.



tidak diatur dalam Al-Qur'an, Nabi Muhammad SAW mengatur dan memutuskan sendiri.¹¹

Untuk urusan politik dalam negeri, Nabi Muhammad SAW mendirikan lembaga hisbah untuk mengawasi ketertiban umum, termasuk pengawasan terhadap pedagang yang melakukan kecurangan. Di setiap kota, Nabi mengangkat petugas hisbah (muhtasib). Nabi juga mengangkat sahabat-sahabatnya sebagai gubernur dan hakim di beberapa daerah, seperti Muadz bin Jabal yang diangkat sebagai hakim di Yaman. Selain itu, Nabi mengelola zakat, pajak, dan ghanimah untuk kesejahteraan rakyat. Dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan, Nabi dibantu oleh beberapa sekretaris, di antaranya Zaid bin Tsabit dan Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad SAW juga menjalankan kebijakan luar negeri dengan menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara sahabat dan mengangkat duta-duta ke negara lain. Salah satu contohnya adalah pada tahun kedua hijrah, Nabi mengangkat Amr bin Umaysh al-Damari sebagai duta di Abesinia, serta menerima duta dari negara lain, seperti Wahsyi yang mewakili Quraisy Makkah dalam perundingan Hudaibiyyah.

Ketatanegaraan Masa Khulafaur Rasyidin

Pada saat Rasulullah wafat, estafet kepemimpinan diberikan kepada Abu Bakar bernama lengkap Abdullah bin Abi Quhafah bin Amir, memiliki garis keturunan yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW pada kakek keenam, Murrâh. Abu Bakar lahir dua tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW.¹² Kepemimpinan Abu Bakar berlangsung selama dua tahun, dengan tujuan utama mempererat persatuan umat Islam yang terpecah setelah banyak orang Arab yang murtad, serta menyiapkan kekuatan untuk menaklukkan Persia dan Syam. Pada tahun 13 H, Abu Bakar wafat pada usia 63 tahun dan dimakamkan di kamar Aisyah, dekat dengan makam Nabi. Abu Bakar dikenal sebagai orang pertama yang memeluk Islam dan termasuk dalam golongan Assabiqunal Awalun. Ia adalah sahabat Rasulullah yang paling setia dan dianggap seperti saudara oleh Nabi. Ibnu Abbas menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Seandainya aku bisa*

¹¹ Muhamad Ginanjar, Muhammad Fawwaz Zikrillah, and Muhammad Nabil Hibatullah, "Ayat-Ayat Terkait Lembaga Negara Dalam Perspektif Al-Qur'an," *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Dan Akuntansi* 2, no. 2 (2023): 975–84.

¹² Adelia Ramzar, Muhammad Hidayat Harahap, and Tengku Najib Ahmad Kamil, "Pemikiran Politik Pada Masa Khulafaur Rasyidin," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu Nusantara* 2, no. 2 (2025): 14–19.



memilih kekasih lain (selain Allah), aku akan memilih Abu Bakar, padahal dia adalah saudara dan sahabatku."

Abu Bakar menerima baiat sebagai khalifah di tengah situasi yang genting dan kacau. Banyak orang yang murtad dan muncul nabi-nabi palsu yang mengancam eksistensi negara Islam yang baru.¹³ Meskipun pengangkatan Abu Bakar berawal dari kesepakatan bersama, faktor utama kekacauan yang terjadi adalah pemahaman sebagian orang yang menganggap meninggalnya Rasul sebagai berakhirnya ikatan Islam dan mereka pun meninggalkan agama. Sebagai khalifah, Abu Bakar menjalankan kekuasaan yang terpusat, mencakup fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif, meskipun ia selalu berkonsultasi dengan para sahabat dalam memutuskan suatu masalah.

Kepemimpinan Abu Bakar yang berlangsung dari tahun 632 hingga 634 M berhasil menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah pemberontakan orang-orang yang murtad setelah wafatnya Nabi. Dengan izin Allah, Abu Bakar memimpin pasukan untuk memerangi mereka dan mengembalikan keutuhan umat Islam. Selain itu, Abu Bakar juga mengirim pasukan ke Irak dan Syam untuk menyebarkan ajaran Islam. Salah satu pencapaian besar Abu Bakar adalah pengkodifikasian Al-Qur'an, di mana ia memerintahkan Zaid bin Tsabit untuk mengumpulkan Al-Qur'an dari berbagai tempat seperti kulit unta, pelepah kurma, batu, daun, dan hafalan para sahabat, setelah banyak penghafal Al-Qur'an yang meninggal dalam perang Yamamah.

Abu Bakar Ash-Shiddiq yang dikenal dengan gelarnya yang berarti jujur, adalah pemimpin yang menjaga amanah dan bersikap tegas terhadap orang-orang yang menyimpang. Ia menjalankan tugas kepemimpinan dengan baik, berpegang pada ajaran Allah dan Rasul-Nya. Secara keseluruhan, model pemerintahan Abu Bakar melanjutkan sistem yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik dalam kebijakan yang berkaitan dengan agama maupun pemerintahan. Kepemimpinan Abu Bakar berdampak besar pada perkembangan pemerintahan Islam. Berikut adalah beberapa prestasi besar Abu Bakar selama menjabat sebagai khalifah:

- a) Menertibkan kaum yang *murtad* (keluar dari Islam)
- b) Mengajak kembali umat Islam kepada ajaran yang benar
- c) Menegakkan kewajiban pembayaran zakat
- d) Menumpas gerakan Nabi-Nabi palsu

¹³ Ibnu Imam Al Ayyubi et al., "Studi Komparatif Dinamika Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin," *JAZIRAH: Jurnal Peradaban Dan Kebudayaan* 5, no. 1 (2024): 73–92.



- e) Mengkodifikasi Al-Qur'an
- f) Memperluas wilayah kekuasaan Islam
- g) Mengirimkan pasukan Usamah bin Zaid ke Syam
- h) Mengirimkan pasukan ke Irak dan Syam.¹⁴

Setelah Abu Bakar Ash-Shiddiq wafat, estafet kepemimpinan diberikan kepada Umar bin Khattab yang memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Abd al-'Uzza bin Riyah bin Qurth bin Razah bin 'Adiy bin Lu'ayy al-Qurasyiy al-'adawiy, berasal dari keluarga kelas menengah. Ia adalah putra dari Khattab dan Khatmah, lahir di Mekah sekitar tahun 584 M, atau 13 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Umar dikenal sebagai pribadi yang lemah lembut, namun tegas, berani, kuat, tinggi, serta mahir dalam berkuda dan bergulat.

Sebagai khalifah kedua dari Khulafaur Rasyidin, Umar bin Khattab diangkat melalui musyawarah, dengan usulan dari Abu Bakar yang kemudian disetujui oleh umat Islam. Pengangkatannya sebagai khalifah terjadi setelah peristiwa Tsaqifah Bani Saidah, di mana baik pemuka kaum Ansar maupun Muhajirin mengklaim sebagai kelompok yang sah untuk memimpin, sementara saat itu Islam baru saja menertibkan kaum murtad. Ketika Abu Bakar sakit, ia melakukan jajak pendapat di kalangan sahabat terkemuka untuk mengetahui siapa yang layak menggantikannya. Pilihan akhirnya jatuh pada Umar bin Khattab, yang kemudian dibaiat sebagai khalifah dan sekaligus diangkat sebagai panglima tertinggi pasukan Islam dengan gelar Amir al-Mu'minin (panglima orang-orang beriman).¹⁵

Di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, stabilitas politik tercapai, dan wilayah kekuasaan Islam berkembang pesat. Wilayah yang dikuasai meliputi Semenanjung Arab, Palestina, Suriah, Persia, Mesir, dan Irak. Penaklukan Suriah terjadi pada tahun 636 M, yang mencakup kota-kota seperti Hamah, Qinisrin, Lazqiyah, dan Alepo. Yerusalem juga jatuh setelah pengepungan selama empat bulan.

Selain memperluas wilayah, Umar juga memiliki kontribusi besar dalam perkembangan peradaban Islam. Ia dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, cerdas dalam berpolitik, dan berhasil memenangkan berbagai peperangan. Umar bin Khattab

¹⁴ Muhammad Ikrom et al., "Peradaban Islam Di Masa Khulafaurasyiddin," *Journal of Religion and Social Community* 1, no. 2 (2024): 50–56.

¹⁵ Nur Abdul Kholik Nugroho and Mohammad Khusnul Hamdani, "Internalisasi Nilai-Nilai Kepemimpinan Profetik Pada Masa Khulafaur Rasyidin," *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 5, no. 2 (2021): 139–49.



juga melakukan reformasi administratif, termasuk membentuk pasukan untuk menjaga perbatasan, mendirikan dewan dan baitul mal, mencetak uang, mengatur gaji, serta mengangkat pejabat dan hakim. Pemerintahan Umar juga mengatur pasar, dan menciptakan berbagai penaklukan serta perkembangan administrasi yang signifikan.

Langkah politik selanjutnya yang diambil oleh Umar bin Khattab adalah pembentukan dua majelis permusyawaratan (badan syura), yaitu sidang umum dan khusus. Salah satu langkah awalnya adalah mengumpulkan umat Islam, terutama yang berada di ibu kota, untuk membahas masalah penting dan menerima saran dari mereka. Selain itu, ia juga membahas urusan sehari-hari dan hasil muktamar yang dihadiri oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW untuk mendengarkan pendapat dan nasihat mereka.¹⁶

Setelah Umar Bin Khattab memimpin estefet kepemimpinan pun diberikan kepada Utsman Bin Affan, Utsman masuk agama Islam pada usia 34 tahun bersama Thalbah bin Ubaidilah, karena ajakan Abu Bakar. Ketika beragama Islam Utsman mendapat tentangan dari Hakim yang merupakan pamannya sendiri. Bahkan, dia disiksa dengan pedih tapi Utsman tetap istiqomah/teguh pendirian terhadap Islam.

Utsman terpilih pada bulan dzulhidjah 23 H dan masa pemerintahan Utsman merupakan yang terlama di antara Khulafaur Rasyidin, yaitu 12 tahun (644 M-656 M). Utsman Bin Affan sudah dilatih kepemimpinannya sebelum beliau menjadi Khalifah, Namun ahli sejarah menunjukkan bahwa seluruh kekuasaannya bukan masa yang sukses dan menguntungkan baginya. Kronik membagi masa Ustman dalam dua masa, enam tahun pertama menjadi masa pemerintahan yang baik dan enam tahun terakhir adalah masa yang buruk.¹⁷

Adapun beberapa negara yang berada di kekuasaan Islam pada masa Utsman: Barqoh, Armenia, Tripoli bagian barat, negara Nubah bagian selatan dan sebagian Tabaristan, bahkan tentara Islam melintasi Jihun (Amu Darya), Sungai Balkh, Kabul, Hara dan Gzaznah. Selain itu masih banyak kontribusi Khalifah Utsman bagi Islam seperti: pelebaran masjid nabawi dan merenovasinya dengan model terbaru. Ketika zaman Rasul mesjid nabawi sangatlah sederhana beralas batu bata, atap pelepah kurma dan tiang yang dibuat dari kayu pohon kurma. Di kepemimpinan Usman perubahannya

¹⁶ Muhammad Fitriyadi, "Pada Masa Khalifah Umar Bin Khatab : Kemajuan Islam Sebagai Kekuatan Politik," *Hikamatzu Journal of Multidisiplin* 1, no. 1 (2024): 121–28.

¹⁷ Al Ayyubi et al., "Studi Komparatif Dinamika Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin."



meliputi tembok/dinding masjid yang dari batu ukir perak, tiangnya tetap sama, tapi atapnya kayu jati, dan pintunya tetap 6 sama dimasa Umar bin Khattab dulu.¹⁸

Khalifah Utsman wafat pada 17 Juni 656 M di Madinah. Ketika beliau sedang membaca Al-Quran dirumah, datang kumpulan pemberontak yang berasal dari mesir. Beliau terbunuh pada 35 H karena pemberontak yang memanjat dan mengepuk rumah Utsman berhasil masuk, meskipun awalnya sudah dihalangi para istrinya. Begitulah kisah Khalifah Utsman yang dermawan, tetapi dia lemah menghadapi para perampok.

Khalifah selanjutnya yaitu Ali bin Abi Thalib, ia memeluk agama Islam di usia muda dan menjadi salah satu dari kalangan pertama yang masuk Islam, tergabung dalam golongan *As-Sabiqunal Awwalun*. Beliau adalah keponakan sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW, karena ayahnya, Abu Thalib, adalah paman Nabi.¹⁹ Ali menikahi Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad. Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa posisi Ali di sisinya mirip dengan posisi Harun di sisi Nabi Musa. Diriwayatkan oleh Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Waqqash, bahwa Rasulullah bersabda kepada Ali, *“Apakah kau tidak ridho bahwa kedudukanmu disampingku seperti Harun dengan Musa?”*

Ali memimpin sebagai Khalifah keempat selama lima tahun, dan ia menghadapi banyak tantangan yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya. Pada masa pemerintahannya, terjadi konflik besar, termasuk Perang Basra, yang merupakan perang saudara pertama antar umat Islam, antara pasukan Ali yang berjumlah 20.000 melawan pasukan Zubair bin Awwam, Thalhah bin Ubaidillah, dan Aisyah binti Abu Bakar, istri Rasulullah. Ali memenangkan pertempuran tersebut.

Akan tetapi, konflik tidak berhenti di situ. Salah satu peristiwa paling terkenal selama masa kepemimpinan Ali adalah Perang Siffin, yang terjadi antara pasukan Ali dan Muawiyah. Perang ini juga menyebabkan kelemahan bagi kekhalifahan Ali. Meskipun menghadapi berbagai kericuhan dan konflik, Ali tetap memberikan kontribusi besar bagi peradaban Islam. Ia mencabut hibah tanah yang dibagikan oleh Utsman bin Affan kepada keluarganya dan mengalihkannya menjadi milik negara. Ali juga mengganti gubernur dan pejabat yang tidak kompeten, memperbaiki keuangan negara, serta memajukan ilmu pengetahuan, bahasa, dan pembangunan.

¹⁸ Hanizar Meda Simbolon, Arbanur Rasyid, and Muhammad Wandisyah R Hutagalung, “Negara Ideal Menurut Surah Al-Baqarah Ayat 126,” *Jurnal El-Qanuniy: Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2021): 11–24.

¹⁹ Firmansyah, Riyani, and Putri, “Prinsip Syura Dalam Ketatanegaraan Indonesia.”



Sayyidina Ali dikenal sebagai pemimpin yang cerdas dengan kemampuan luar biasa dalam bidang militer dan strategi perang. Namun, ia mengalami kesulitan dalam mengelola administrasi negara akibat banyaknya kericuhan yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya. Ali wafat pada usia 63 tahun setelah dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam dari kelompok Khawarij. Ia dibunuh ketika sedang memimpin sholat subuh di Masjid Kufah pada 19 Ramadhan dan meninggal dua hari kemudian, tepatnya pada 21 Ramadhan tahun 40 Hijriah. Ali dimakamkan secara rahasia di Najaf, meskipun ada riwayat yang mengatakan bahwa ia dikuburkan di tempat lain.²⁰

Dalam upaya mengatasi pemberontakan, Ali menggunakan dua pendekatan: perjanjian damai dan peperangan. Namun, keduanya tidak berhasil menyelesaikan masalah tersebut hingga Ali terbunuh. Keadaan baru mencapai perdamaian ketika putranya, Hasan bin Ali, menyerahkan tahta kepada Muawiyah, yang memiliki ambisi besar untuk memimpin umat Islam. Penyerahan kekuasaan ini menandai berakhirnya masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin.

Ketatanegaraan Masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah

Setelah terbunuhnya Ali, kepemimpinan Islam beralih kepada Mu'awiyah bin Abu Sufyan, yang kemudian mendirikan Dinasti Bani Umayyah (661-750 M). Mu'awiyah membentuk sistem pemerintahan yang mirip monarki, di mana kekuasaan diwariskan turun-temurun dalam keluarganya. Selama masa Dinasti Umayyah, terjadi ekspansi besar yang dikenal sebagai gelombang ekspansi kedua. Salah satu pencapaian besar adalah penaklukan Spanyol pada masa pemerintahan Khalifah al-Walid (705-715 M), seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Sebelumnya, wilayah Afrika Utara telah dikuasai dan dijadikan provinsi Bani Umayyah, dengan penguasaan penuh terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik (687-705 M). Di masa al-Walid, Musa bin Nushair berhasil memperluas wilayah Islam ke Aljazair dan Maroko.²¹

Keberhasilan ini didorong oleh beberapa faktor, baik eksternal maupun internal. Faktor eksternalnya adalah kondisi sosial, politik, dan ekonomi di Spanyol yang sangat buruk pada saat itu, yang memberikan kesempatan bagi penaklukan. Faktor internalnya

²⁰ H.M Zainuddin, "Islam Dan Demokrasi," UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013, <https://uin-malang.ac.id/blog/post/read/131101/islam-dan-demokrasi.html>.

²¹ Erik Yudistira, M. Eza Helyatha Begouvic, and Husni Tamrin, "Sistem Pemerintahan Dalam Masa Bani Umayyah," *Sol Justicia* 5, no. 2 (2023): 176–81, <https://doi.org/10.54816/sj.v5i2.573>.



mencakup soliditas penguasa dan semangat juang para pejuang Muslim, serta sikap toleransi beragama dan persaudaraan di kalangan umat Islam, yang membuat penduduk Spanyol menerima Islam dengan baik.²²

Selain itu, pendekatan diplomatik dan pengelolaan yang bijaksana terhadap wilayah yang ditaklukkan turut berperan penting dalam memperkuat posisi Islam di Spanyol. Sejak kedatangan Islam di Spanyol hingga runtuhnya kerajaan Islam terakhir pada 1429 H, Islam memainkan peran yang sangat penting selama hampir delapan abad, baik dalam bidang sosial, budaya, maupun ekonomi. Kehadiran Islam di Spanyol juga memberi kontribusi signifikan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban, yang kelak mempengaruhi Eropa dan dunia secara lebih luas. Ini menunjukkan bahwa selain aspek politik dan militer, faktor budaya dan intelektual juga menjadi bagian integral dari ekspansi Islam pada masa Dinasti Umayyah.

Runtuhnya Dinasti Umayyah disebabkan oleh berbagai tantangan yang dihadapi sejak awal berdirinya dinasti tersebut. Salah satu tantangan terbesar yang pada akhirnya menyebabkan kejatuhannya datang dari kelompok Syiah.²³ Kelompok ini, yang merupakan pengikut setia Ali bin Abi Thalib, percaya bahwa Ali seharusnya menjadi pengganti Nabi Muhammad SAW sebagai Khalifah umat Islam. Kejatuhan Bani Umayyah dipicu oleh kemunculan cabang Quraisy lainnya, yaitu Abu al-Abbas, yang bekerja sama dengan kelompok Syiah. Serangan terhadap Bani Umayyah dimulai di Khurasan dan berhasil menjatuhkan mereka pada tahun 750 M. Setelah itu, Khalifah Bani Umayyah digantikan oleh Khalifah Abu al-Abbas.

Keberhasilan dalam menggulingkan Dinasti Umayyah tidak lepas dari beberapa faktor. Pertama, adanya propaganda terus-menerus yang dilakukan oleh al-Abbas kepada masyarakat yang kecewa dengan kepemimpinan Bani Umayyah. Kedua, meningkatnya jumlah pendukung pemberontakan dari berbagai kalangan yang dipenuhi dengan kebencian terhadap Bani Umayyah, yang mempermudah mobilisasi massa. Ketiga, ketidakadilan yang diterapkan oleh Dinasti Umayyah menyebabkan semakin dalamnya

²² Suhernawati et al., "Pemikiran Pendidikan Masa Bani Umayyah Damaskus Dan Andalusia," *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora* 9, no. 1 (2025): 31–42, <https://doi.org/10.36526/js.v3i2.4855>.

²³ Ainur Riska Amalia, "Sejarah Peradaban Islam : Perkembangan Ilmu Pengetahuan Pada Masa Pemerintahan Diinasti Bani Abbasiyah," *Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan* 10, no. 01 (2022): 53–64, <https://doi.org/10.24252/rihlah.v10i01.38405>.



kebencian rakyat. Keempat, kelemahan internal yang dimiliki oleh Dinasti Umayyah sendiri.²⁴

Pada awal pemerintahan Dinasti Abbasiyah, berbagai masalah muncul yang harus segera diatasi. Namun, berkat kepemimpinan yang tangguh, semua masalah tersebut dapat diatasi dengan baik. Meskipun demikian, kekuasaan Dinasti Abbasiyah perlahan-lahan kehilangan pengaruhnya. Para khalifah setelahnya tidak mampu mengatasi kemerosotan ini, terutama dengan semakin banyaknya tentara asal Turki yang mendukung Asyinas. Secara politik, kekuasaan khalifah Dinasti Abbasiyah semakin melemah. Di sisi lain, meskipun kelemahan politik, perkembangan intelektual, ilmu pengetahuan, dan filsafat tetap berkembang pesat. Kemajuan tersebut semakin meningkat pada masa Buwaih, dengan bermunculannya ilmuwan dan filsuf yang membawa gagasan-gagasan baru.²⁵

Kelemahan Dinasti Abbasiyah semakin diperburuk dengan terjadinya perpecahan internal dan ketegangan antar kelompok yang mendukung berbagai kepentingan politik. Ketidakstabilan ini mengarah pada meningkatnya ketergantungan pada kekuatan eksternal, seperti tentara Turki, yang semakin memperburuk posisi khalifah. Meskipun demikian, meski kekuasaan politik mulai merosot, kota Baghdad tetap menjadi pusat peradaban dunia, di mana perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan budaya terus berlangsung.²⁶ Perkembangan ini berperan besar dalam mewariskan pengetahuan dan inovasi yang kemudian mempengaruhi perkembangan Eropa dan dunia pada masa berikutnya. Namun, pada akhirnya, dominasi Dinasti Abbasiyah mulai berakhir ketika Baghdad jatuh ke tangan Mongol pada tahun 1258 M, menandai berakhirnya era kejayaan mereka dan sekaligus mengakhiri peran politik mereka di dunia Islam.²⁷

²⁴ Nurul Asri, Azdiva Miftahur Rizkiyah, and Ellya Roza, "Refleksi Pendidikan Dinasti Abbasiyah," *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* 5, no. 2 (2024): 541–49.

²⁵ Vika Rahmatika Hidayah, "Sistem Pendidikan Islam Dinasti Abbasiyah Pada Masa Khalifah Abu Ja'Far Al-Manshur (754-775 M)," *Repository UIN SAIZU* (2023), [https://repository.uinsaizu.ac.id/22432/1/VikaRahmatikaHidayah-SISTEM PENDIDIKAN ISLAM DINASTI ABBASIYAH PADA MASA KHALIFAH ABU JA.pdf](https://repository.uinsaizu.ac.id/22432/1/VikaRahmatikaHidayah-SISTEM%20PENDIDIKAN%20ISLAM%20DINASTI%20ABBASIYAH%20PADA%20MASA%20KHALIFAH%20ABU%20JA.pdf).

²⁶ Getar Rahmi Pertiwi and Devi Nirmayuni, "Tinjauan Kritis Peradaban Islam Pada Masa Bani Abbasiyah," *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 2, no. 1 (2024): 43–52, <https://doi.org/10.61104/jq.v2i1.297>.

²⁷ Azizah Nurtanti and Nuryuana Dwi Wulandari, "Masa the Golden Age Dan Kemunduran Dinasti Abbasiyah," *Jambura History and Culture Journal* 5, no. 1 (2023): 70–81, <https://doi.org/10.37905/jhcj.v5i2.20702>.



D. Penutup

Sistem pemerintahan pada masa Nabi Muhammad SAW di Madinah menjadi cikal bakal negara Islam yang menggabungkan aspek agama dan politik. Piagam Madinah, yang disusun oleh Nabi Muhammad, mengatur hak dan kewajiban warga, baik Muslim maupun non-Muslim, serta menempatkan Nabi sebagai kepala negara. Keputusan-keputusan politik diambil melalui musyawarah dan ijtihad, tanpa memisahkan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang menjadikan sistem pemerintahan pada masa ini lebih inklusif dan adil.

Setelah masa Nabi Muhammad, pemerintahan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin yang menekankan musyawarah dan konsensus dalam pengambilan keputusan. Di masa ini, Islam berkembang pesat dengan ekspansi wilayah yang luas, meskipun diwarnai beberapa konflik internal. Selanjutnya, pada masa Dinasti Umayyah, sistem pemerintahan cenderung monarkis dengan kekuasaan yang terpusat pada khalifah dan lebih sekuler. Hal ini menyebabkan ketimpangan sosial dan ketidakpuasan di kalangan kelompok tertentu. Pada masa Dinasti Abbasiyah, pemerintahan semakin terstruktur dengan birokrasi yang efisien dan pengembangan ilmu pengetahuan yang pesat. Meskipun menghadapi tantangan berupa pemberontakan, Abbasiyah berhasil mengorganisir administrasi negara dengan lebih baik. Secara keseluruhan, meskipun ada perbedaan dalam sistem pemerintahan dari Khulafaur Rasyidin hingga Abbasiyah, prinsip dasar keadilan dan persatuan yang diajarkan Nabi Muhammad tetap menjadi dasar penting dalam pemerintahan Islam.

REFERENSI

- Ainur Riska Amalia. "Sejarah Peradaban Islam: Perkembangan Ilmu Pengetahuan Pada Masa Pemerintahan Dinasti Bani Abbasiyah." *Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan* 10, no. 01 (2022): 53–64. <https://doi.org/10.24252/rihlah.v10i01.38405>.
- Amirulkamar, Said, and Eka Januar. *Politik Dan Pemerintahan Islam*. Edited by Badri Hasan. *Zahir Publishing*. Edisi ke-1. Sleman, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.
- Anggarwal, Chanchal. "Penelitian Deskriptif vs Analitis: Memahami Perbedaannya." *Shiksha Online*, 2025. <https://www.shiksha.com/online-courses/articles/descriptive-vs-analytical-research-understanding-the-difference/>.
- Anisa, D. (2021). *Etika profesi hukum*. Jakarta: KENCANA. <https://repo.uinsyahada.ac.id/984/>
- Armaya Azmi, Azhari Akmal Tarigan, Dedi Mahruzani Nur Lubis, Dody Wijaya Hardi, Fajriawati, Faisal, Heri Firmansyah, et al. *Politik Hukum Islam: Pergumulan Politik Dalam Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*. Edited by Armaya Azmi. Edisi ke-1. Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021.



- Artrisdyanti, Revlina Octavia, and Vanya Karunia Mulia Putri. "Sampel Penelitian: Pengertian, Tujuan, Dan Cara Menentukannya." Kompas.com, 2023. <https://www.kompas.com/skola/read/2023/05/12/090000569/sampel-penelitian--pengertian-tujuan-dan-cara-menentukannya?page=all>.
- Asri, Nurul, Azdiva Miftahur Rizkiyah, and Ellya Roza. "Refleksi Pendidikan Dinasti Abbasiyah." *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* 5, no. 2 (2024): 541–49.
- Ayyubi, Ibnu Imam Al, Zairina Fauziah, Hasanah Arifah, Ratna Dewi Hartati, and Risman Herdiansyah. "Studi Komparatif Dinamika Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin." *JAZIRAH: Jurnal Peradaban Dan Kebudayaan* 5, no. 1 (2024): 73–92.
- Fauzi, Irfan, Abdul Mukti, and Zaini Dahlan. "Pembangunan Pemerintahan Madinah Melalui Pemikiran Dan Usaha Intelektual Perspektif Peradaban Islam Masa Nabi Muhammad Saw." *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 8, no. 2 (2021): 123–27. <https://doi.org/10.56015/governance.v8i2.46>.
- Firmansyah, Windy Riyani, and Nyimas Lidya Putri. "Prinsip Syura Dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 3, no. 1 (2023): 36–49. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.7209>.
- Fitriyadi, Muhammad. "Pada Masa Khalifah Umar Bin Khatab : Kemajuan Islam Sebagai Kekuatan Politik." *Hikamatzu Journal of Multidisiplin* 1, no. 1 (2024): 121–28.
- Ginanjar, Muhamad, Muhammad Fawwaz Zikrillah, and Muhammad Nabil Hibatullah. "Ayat-Ayat Terkait Lembaga Negara Dalam Perspektif Al-Qur'an." *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Dan Akuntansi* 2, no. 2 (2023): 975–84.
- Hidayah, Vika Rahmatika. "Sistem Pendidikan Islam Dinasti Abbasiyah Pada Masa Khalifah Abu Ja'Far Al-Manshur (754-775 M)." *Repository UIN SAIZU*, 2023. https://repository.uinsaizu.ac.id/22432/1/Vika_Rahmatika_Hidayah_-SISTEM_PENDIDIKAN_ISLAM_DINASTI_ABBASIYAH_PADA_MASA_KHALIFAH_ABU_JA.pdf.
- Ikrom, Muhammad, Muhammad Hirsu, Jihan Zahirah, Umar Al-faruq, Muhammad Saw, Umar Khattab, and Utsman Affan. "Peradaban Islam Di Masa Khulafaurasyiddin." *Journal of Religion and Social Community* 1, no. 2 (2024): 50–56.
- Nugroho, Nur Abdul Kholik, and Mohammad Khusnul Hamdani. "Internalisasi Nilai-Nilai Kepemimpinan Profetik Pada Masa Khulafaur Rasyidin." *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 5, no. 2 (2021): 139–49.
- Nurtanti, Azizah, and Nuryuana Dwi Wulandari. "Masa the Golden Age Dan Kemunduran Dinasti Abbasiyah." *Jambura History and Culture Journal* 5, no. 1 (2023): 70–81. <https://doi.org/10.37905/jhej.v5i2.20702>.
- Pujiati. "Sumber Data Penelitian: Jenis, Bentuk, Metode Pengumpulan." Deep Publish, 2024. <https://penerbitdeepublish.com/sumber-data-penelitian/>.
- Rahmi Pertiwi, Getar, and Devi Nirmayuni. "Tinjauan Kritis Peradaban Islam Pada Masa Bani Abbasiyah." *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 2, no. 1 (2024): 43–52. <https://doi.org/10.61104/jq.v2i1.297>.
- Ramzar, Adelia, Muhammad Hidayat Harahap, and Tengku Najib Ahmad Kamil. "Pemikiran Politik Pada Masa Khulafaur Rasyidin." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu Nusantara* 2, no. 2 (2025): 14–19.
- Rudiansyah, R. "Analisis Pemikiran Politik Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo Tentang Negara Islam Indonesia." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021. <http://repository.uinsu.ac.id/15474/%0Ahttp://repository.uinsu.ac.id/15474/1/TESIS-RUDIANSYAH-NIM3001193007.pdf>.
- Saputri, Fenolia Intan, and Moch Choirul Rizal. "Studi Pemikiran Ketatanegaraan Imam Al-



- Mawardi.” *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022): 15–32. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i1.157>.
- Sari, Nadya Putri Permata, and Saadatul Maghfira. “Tinjauan Hukum Tata Negara Islam Terhadap Peran Pemerintah Dalam Menjaga Ketenteraman Dan Ketertiban Umum.” *Jurnal Integrasi Ilmu Syari’ah* 2, no. 1 (2021): 124–34. <https://doi.org/10.31857/s013116462104007x>.
- Simbolon, Hanizar Meda, Arbanur Rasyid, and Muhammad Wandisyah R Hutagalung. “Negara Ideal Menurut Surah Al-Baqarah Ayat 126.” *Jurnal El-Qanuniy: Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2021): 11–24.
- Suherawati, Supardi Ritonga, Gusti Erlina, and Suswanto. “Pemikiran Pendidikan Masa Bani Umayyah Damaskus Dan Andalusia.” *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora* 9, no. 1 (2025): 31–42. <https://doi.org/10.36526/js.v3i2.4855>.
- Yudistira, Erik, M. Eza Helyatha Begovic, and Husni Tamrin. “Sistem Pemerintahan Dalam Masa Bani Umayyah.” *Sol Justicia* 5, no. 2 (2023): 176–81. <https://doi.org/10.54816/sj.v5i2.573>.
- Zainuddin, H.M. “Islam Dan Demokrasi.” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013. <https://uin-malang.ac.id/blog/post/read/131101/islam-dan-demokrasi.html>.